



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jalan Pramuka Nomor 33 Jakarta 13120
Telepon: (021) 8591 0031 (*Hunting*), Faksimile: (021) 8591 0030
email: humas@bpkp.go.id, website: www.bpkp.go.id

Nomor : OT.04/LPP-552/SU04/3/2023 27 Juni 2023
Lampiran : -
Hal : Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Triwulan II Tahun 2023

Yth. Kepala Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Tata Laksana di Jakarta

Dengan ini kami sampaikan Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut.

A. TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Target kinerja periode jangka menengah Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2020-2024 ditetapkan dalam Peraturan BPKP nomor 2 tahun 2020 tentang Rencana Strategis BPKP. Target kinerja tersebut disajikan dalam tabel 1 yang memuat sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, dan target per tahun sepanjang periode Renstra dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Tabel 1 - Target Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi 2020-2024

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Tahunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5				
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	Nilai area penguatan peraturan perundangan pada Indeks RB	Indeks (Skala 1-5)	3,15	3,15	3,16	3,16	3,17
2	Meningkatnya Reputasi BPKP	Indeks Reputasi BPKP	Indeks (Skala 1-100)	70	72	74	76	78
3	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP (1)	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Persen	n/a	70	70	70	70
4	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi (2)	Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks (Skala 1-10)	8,68	8,69	8,69	8,71	8,72

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Tahunan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5				
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan (3)	Persentase Layanan legislasi yang diselesaikan sesuai dengan SOP	Persen	n/a	n/a	n/a	100	100

- (1) Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP” merupakan Sasaran Kegiatan yang baru ditambahkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2021, sehingga tidak terdapat dalam Renstra BPKP 2020-2024. Untuk mengakomodasi sasaran kegiatan baru tersebut, target tahun 2021 s.d. 2024 ditetapkan sebesar 70%.
- (2) Target IKK Sasaran Kegiatan “Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi” tahun 2023 pada Renstra BPKP adalah 8,71.
- (3) Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penguatan Peraturan Perundangan” merupakan Sasaran Kegiatan yang baru ditambahkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023, sehingga tidak terdapat dalam Renstra BPKP 2020-2024. Untuk mengakomodasi sasaran kegiatan baru tersebut, target tahun 2023 s.d. 2024 ditetapkan sebesar 100%.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Target kinerja Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2023 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2023 sebagaimana disajikan dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2 - Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan (SK)	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target 2023
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1.1 Nilai RB Penguatan Peraturan Perundang-undangan – Deregulasi Kebijakan	Indeks (Skala 1-5)	3,16
2	Meningkatnya Reputasi BPKP	2.1 Indeks Reputasi BPKP	Indeks (Skala 1-100)	76
3	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	3.1 Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Indeks (Skala 1-10)	8,71
4	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP	4.1 Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Persen	70 1)
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan (2)	5.1 Persentase Layanan legislasi yang diselesaikan sesuai dengan SOP	Persen	100

Dari data di atas, terdapat dua target Perjanjian Kinerja (Perkin) tahun 2023 yang berbeda dari target dalam Renstra/ yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu:

- (1) Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan (target Perkin 2023 sebesar 70%) baru ada di tahun 2022.
- (2) Persentase Layanan legislasi yang diselesaikan sesuai dengan SOP (target Perkin 2023 sebesar 100%) baru ada di tahun 2023.

Untuk mengukur akuntabilitas kinerja Biro Hukum dan Komunikasi, target kinerja yang digunakan adalah target kinerja sesuai Perjanjian Kinerja yang telah ditandatangani. Oleh karena itu, target Renstra disesuaikan mengikuti target Perjanjian Kinerja 2023.

C. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Biro Hukum dan Komunikasi memiliki lima sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan lima indikator kinerja kegiatan (IKK) guna mengukur kinerja Biro. Pada triwulan II tahun 2023, satu capaian indikator kinerja menggunakan data periode sebelumnya, sedangkan empat sisanya belum tersedia datanya. Pada triwulan II tahun 2023, target, realisasi dan capaian kinerja kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 – Capaian Kinerja Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Sasaran Kegiatan (SK)		Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)		Kinerja Kegiatan			
				Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1		2		3	4	5	6=5/4
1	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1	Nilai area penguatan peraturan perundangan pada Indeks RB	Skala 1-5	3,16	4,44	140,51
2	Meningkatnya Reputasi BPKP	1	Indeks Reputasi BPKP	Skala 1-100	76	N/A	N/A
3	Meningkatnya kualitas layanan Biro Hukum dan Komunikasi	1	Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi	Skala 1-10	8,71	N/A	N/A
4	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Tugas BPKP	1	Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan	Skala 1-100	70	N/A	N/A
5	Meningkatnya kualitas pelaksanaan penguatan peraturan perundangan	1	Persentase Layanan legislasi yang diselesaikan sesuai dengan SOP	Persen	100	N/A	N/A

Adapun uraian dan analisis lebih lanjut mengenai capaian kinerja kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN 1: MENINGKATNYA KUALITAS PELAKSANAAN PENGUATAN PERATURAN PERUNDANGAN

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Penguatan Peraturan Perundangan” diukur dari satu IKK, yaitu “Nilai Area Penguatan Peraturan Perundangan pada Indeks RB” dengan target nilai tahun 2023 sebesar 3,16.

Pada triwulan II tahun 2023, realisasi Nilai Area Penguatan Peraturan Perundangan pada Indeks RB tahun 2023 masih menggunakan angka capaian tahun 2020 karena data untuk capaian tahun 2022 belum didapatkan dari Kementerian PAN RB. Dengan capaian tersebut, realisasi kinerja 2022 (yang dilaporkan di 2023) telah melebihi target tahun 2023 dan 2024 sekaligus. Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya, realisasi kinerja tahun 2023 sama dengan realisasi kinerja tahun 2022.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja tersebut. Faktor pendukung tercapainya target kinerja adalah adanya koordinasi dengan unit kerja pemrakarsa serta koordinasi dengan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pencapaian kinerja yang telah melebihi target tak lantas membuat berpuas diri. Rencana tindak ke depan untuk meningkatkan capaian kinerja yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan kompetensi teknis hukum seperti penyelenggaraan bimbingan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan bagi Analis Hukum dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dan Diklat Fungsional Peraturan Perundang-undangan bagi Fungsional Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama.
- 2) Melakukan kegiatan identifikasi, analisis, pemetaan, dan/atau revisi peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan.
- 3) Melakukan evaluasi atas pelaksanaan sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkelanjutan.

SASARAN KEGIATAN 2: MENINGKATNYA REPUTASI BPKP

Dalam satu kesempatan, Presiden Jokowi berpesan bahwa tugas, fungsi, dan layanan dari pemerintah tidak hanya disampaikan, tetapi juga telah diterima oleh penggunanya, “tidak hanya *sent*, tapi juga *delivered*”. Terkait dengan hal tersebut, dalam kesempatan berbeda, Presiden juga berpesan bahwa setiap lembaga pemerintah wajib membangun reputasi pemerintah, yang nantinya akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Menindaklanjuti arahan-arahan Presiden tersebut, BPKP terus berupaya menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk hadir dan memberikan manfaat kepada publiknya. Atas

upaya tersebut, tentu BPKP perlu mengukur bagaimana penilaian dari publiknya, untuk memastikan tidak ada *gap* antara persepsi dan ekspektasi publik terhadap BPKP, atau disebut dengan pengelolaan reputasi. Sebagai bagian dari pengelolaan reputasi yang dilakukan oleh BPKP, BPKP telah membangun Indeks Reputasi BPKP. Indeks ini merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui persepsi dan ekspektasi publik BPKP, atau disebut dengan masyarakat reputasi BPKP. Atas pengelolaan hubungan yang dilakukan BPKP dengan masyarakat reputasinya, BPKP telah menetapkan indikator-indikator pada setiap tahapan, yaitu tahapan *inputs*, *outputs*, *outtakes*, dan *outcomes*.

Indeks Reputasi BPKP merupakan alat ukur pada tingkatan *outcomes*, yaitu penilaian yang diberikan oleh masyarakat reputasi BPKP atas upaya pengelolaan hubungan yang telah dilakukan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan survei kepada masyarakat sasaran (masyarakat reputasi BPKP), yang terbagi menjadi masyarakat umum, media massa, kelompok atau organisasi masyarakat, dan mitra kerja BPKP. Model Indeks Reputasi BPKP memiliki empat aspek yang terdiri dari aspek Kualitas, Kinerja, Tanggung Jawab, dan Daya Tarik. Empat aspek tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 20 indikator variabel yang pada ujungnya dapat menggambarkan posisi tingkat Reputasi BPKP, yang dinilai dari skala 1 sampai dengan 7 dengan gradasi kualitas reputasi sebagai berikut: 1. *Bad* – 2. *Poor* – 3. *Sufficient* – 4. *Neutral* – 5. *Good* – 6. *Excellent* – 7. *Superior*.

Pada tahun 2023, target Indeks Reputasi BPKP adalah 76 dari skala 100 atau 5,32 dari skala 7. Pengukuran Indeks Reputasi BPKP baru akan dilaksanakan di triwulan keempat. Oleh karena itu, nilai Indeks Reputasi belum dapat disajikan nilainya pada triwulan II tahun 2023 (*Not Available*).

SASARAN KEGIATAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN BIRO HUKUM DAN KOMUNIKASI

Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” diukur dari IKK “Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi” dengan target nilai tahun 2023 sebesar 8,71. Pengukuran Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi baru akan dilaksanakan di triwulan keempat. Oleh karena itu, nilai Indeks Kualitas Layanan Biro Hukum dan Komunikasi belum dapat disajikan nilainya pada triwulan II tahun 2023 (*Not Available*).

SASARAN KEGIATAN 4: PERSENTASE PENYELESAIAN PERMASALAHAN HUKUM YANG TERSELESAIKAN

Indikator kinerja Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan diukur dari jumlah dokumen pendapat hukum dan dokumen penanganan perkara yang diselesaikan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan pendapat hukum dan berkas perkara yang diajukan pihak yang mengajukan komplain/gugatan kepada BPKP.

Pengukuran indikator kinerja ini baru akan dilaksanakan di triwulan keempat. Oleh karena itu, nilai Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan belum dapat disajikan nilainya pada triwulan II tahun 2023 (*Not Available*).

SASARAN KEGIATAN 5: PERSENTASE LAYANAN LEGISLASI YANG DISELESAIKAN SESUAI DENGAN SOP

Pengukuran indikator kinerja ini baru akan dilaksanakan di triwulan keempat. Oleh karena itu, nilai Persentase Penyelesaian Permasalahan Hukum yang terselesaikan belum dapat disajikan nilainya pada triwulan II tahun 2023 (*Not Available*).

D. CAPAIAN OUTPUT KEGIATAN

Output Kegiatan sesuai dengan RKA Biro Hukum dan Komunikasi tahun 2023 sebanyak tiga indikator output kegiatan (IOK) dengan capaian kinerja sampai dengan triwulan II 2023 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4 – Output Kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi s.d. Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator Output Kegiatan (IOK) RKA/DIPA	Satuan	Output		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	Kegiatan	15	7	46,67
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	Laporan	30	18	60
3	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Laporan	31	17	54,84
Rata-rata Capaian					53,84

Tabel 4 menunjukkan bahwa kinerja *output* kegiatan secara umum telah melewati target 50% pada triwulan II 2023. Faktor yang mendukung capaian kinerja *output* ini adalah kompetensi SDM yang menangani kegiatan yang telah ditargetkan serta ragam kegiatan yang turut berkontribusi terhadap kinerja. Secara umum tidak terdapat kendala yang berarti dalam mencapai target IOK.

Rincian kinerja *output* kegiatan dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Output Kegiatan 1

IOK “Jumlah Layanan Analisis Penyusunan Pengelolaan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan” diukur dengan menghitung jumlah kegiatan analisis penyusunan, pengelolaan, dan penyebarluasan peraturan perundang-undangan. IOK ini dilaksanakan oleh Bagian 1 Peraturan Perundang-undangan.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 realisasi *output* sejumlah tujuh kegiatan atau mencapai 46,67% dari target tahun 2023, dengan rincian:

- 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP I.
Pada triwulan I telah dilakukan proses analisis dan *legislative drafting* atas 26 produk hukum BPKP, yang terdiri atas:
 - a) 2 (dua) *draft* Peraturan BPKP;
 - b) 18 (delapan belas) *draft* Peraturan Deputi;
 - c) 4 (empat) *draft* keputusan Kepala BPKP;
 - d) 1 (satu) *draft* Keputusan Sekretaris Utama; dan
 - e) 1 (satu) *draft* Keputusan Inspektur BPKP.
- 2) Penyusunan analisis pembahasan perjanjian/kontrak/MoU I
Pada triwulan I telah dilakukan proses analisis dan *legal drafting* atas 12 draft MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), yang terdiri atas:
 - a) 5 (lima) *draft* MoU; dan
 - b) 7 (tujuh) *draft* PKS.
- 3) Penyusunan abstrak peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan produk hukum BPKP.
Abstrak peraturan perundang-undangan adalah uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan lahirnya/dibuatnya suatu peraturan, dasar hukum dikeluarkannya peraturan, dan ringkasan materi/pokok permasalahan yang diatur dalam peraturan.
Dalam triwulan I, penyusunan abstrak dilakukan terhadap 46 (empat puluh enam) Peraturan Perundang-undangan tingkat nasional dan 22 (dua puluh dua) Peraturan BPKP.
- 4) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Nasional dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum I
Kegiatan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi, menganalisis, menelaah, mengolah, memberi gambaran umum atas peraturan perundang-undangan tingkat nasional sesuai dengan Standar Pengolahan Informasi Hukum yang berlaku yaitu yang tercantum dalam Permenkumham No 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum serta melengkapinya dengan meng-*upload* Peraturan tersebut dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPKP (JDIH BPKP). Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 telah mengelola sebanyak 112 (seratus dua belas) peraturan, yang terdiri dari 16 (enam belas) Undang-undang (UU), 35 (tiga puluh lima) Peraturan Pemerintah (PP), 45 (empat puluh lima) Peraturan Presiden (Perpres), 16 (enam belas) Keputusan Presiden (Keppres), 3 (tiga) Instruksi Presiden (Inpres).
- 5) Evaluasi Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan Produk Hukum BPKP dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum I
Kegiatan yang dilakukan yaitu mengidentifikasi, menganalisis, menelaah, mengolah, memberi gambaran umum atas Peraturan BPKP sesuai dengan Standar Pengolahan Informasi Hukum yang berlaku yaitu yang tercantum dalam Permenkumham No 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum serta

melengkapinya dengan meng-*upload* Peraturan tersebut dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum BPKP (JDIH BPKP). Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 mengelola sebanyak 3 (tiga) Peraturan BPKP, 1 (satu) Keputusan Kepala BPKP dan 2 (dua) Surat Edaran Kepala BPKP.

6) Analisis dan deskripsi peraturan perundang-undangan I

Kegiatan analisis dan deskripsi peraturan perundang-undangan yaitu memberi gambaran, mengidentifikasi permasalahan, menganalisis peraturan perundang-undangan tersebut dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan peraturan perundang-undangan produk hukum BPKP.

7) Harmonisasi dan pemetaan peraturan perundang-undangan I

Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan atas kegiatan evaluasi dan *legislative drafting* Peraturan Perundang-undangan yang bertujuan untuk mendeteksi ada/tidaknya peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmoni, multi tafsir dan tidak efektif yang telah dilakukan selama satu semester.

2. Indikator Output Kegiatan 2

IOK “Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum” diukur dengan menghitung jumlah Laporan Penelaahan Hukum dan Penanganan Bantuan Hukum yang dihasilkan. IOK ini dilaksanakan oleh Bagian 2 Penelaahan dan Bantuan Hukum.

Realisasi *output* sampai dengan triwulan II sebanyak 18 laporan atau mencapai 60% dari target tahun 2023 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- 1) Pendapat hukum atas pengadaan gedung *Smart Building*.
- 2) Pendapat hukum terkait ganti rugi bagi korban yang mengalami Gangguan Ginjal Akut Progresif Atipikal (GGAPA) pada anak.
- 3) Pendapat hukum terkait surat ketua harian Panitia Besar (PB) PON XX Provinsi Papua.
- 4) Pendapat hukum terkait hukuman disiplin.
- 5) Penanganan perkara gugatan perdata Nomor 25/Pdt.Sus-GLL/2022/PN.Niaga Smg di PN Semarang.
- 6) Penanganan sengketa informasi publik Nomor 25/IX/KISB-PS/2022 tanggal di Komisi Informasi Publik Sumatera Barat.
- 7) Penanganan sengketa informasi publik Nomor 22/V/KIP-PS/2019 di Komisi Informasi Pusat.
- 8) Pendampingan terhadap pegawai BPKP yang memberikan keterangan di Kejaksaan Agung sehubungan dengan penyelidikan dugaan penyelewengan dalam tata kelola pupuk bersubsidi Tahun 2017-2022.
- 9) Pendapat hukum terkait pembiayaan akomodasi hotel, transportasi, dan konsumsi untuk penyelenggaraan kegiatan ANOC *Annual General Assembly* tahun 2023 melalui APBN, surat no: HK.03/R/S-401/SU04/2/2023, tanggal 22 Mei 2023.
- 10) Pendapat Hukum terkait Rencana Penugasan Audit PKN Kegiatan Pengadaan Ikan Kaleng Tahap I s.d. Tahap III pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado Tahun 2020, Surat No: HK.03/R/S-439/SU04/2/2023, tanggal 29 Mei 2023.

- 11) Pendapat Hukum terkait Penugasan Pegawai BPKP Aktif di Komite BUMN dan Anak Perusahaan BUMN, Surat No: HK.03/SR/S-454/SU04/2/2023, tanggal 31 Mei 2023.
- 12) Pendapat Hukum terkait Permintaan Opini Hukum atas Penerbitan Surat Utang PT Perusahaan Pengelola Aset, Surat No: HK.03/R/S-469/SU04/2/2023, tanggal 9 Juni 2023.
- 13) Pendapat Hukum terkait Permasalahan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB) pada Proyek Bendungan Beringin Sila di Kabupaten Sumbawa.
- 14) Pendapat hukum terkait Permohonan Penugasan Reviu pada PT Rumah Sakit Haji Jakarta.
- 15) Penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 179/Pdt.G/2022/PN.Bgr di PN Bogor.
- 16) Penanganan perkara Gugatan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2022/PN.Bks di PN Bekasi pada tingkat Banding.
- 17) Pendampingan terhadap pegawai BPKP yang dipanggil untuk memberikan keterangan dalam proses penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi atas pelaksanaan pembangunan prasarana kereta api ringan/*light rail transit* Sumatera Selatan pada Satuan Kerja Pengembangan, Peningkatan, dan Perawatan Perkeretaapian Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan di Bareskrim Polri (31 Mei 2023).
- 18) Pendampingan terhadap pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Riau yang dipanggil untuk memberikan keterangan di Bareskrim Polri (8 Juni 2023).

3. Indikator Output Kegiatan 3

IOK "Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi" diukur dari jumlah Laporan Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi yang dihasilkan. IOK ini dilaksanakan oleh Bagian 3 Komunikasi dan Informasi.

Realisasi *output* sampai dengan triwulan II sebanyak 17 kegiatan atau mencapai 54,84% dari target tahun 2023 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

- 1) Laporan layanan informasi publik tahun 2022
- 2) Laporan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan Biro Hukum dan Komunikasi Triwulan IV Tahun 2022.
- 3) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Januari 2023.
- 4) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Januari 2023.
- 5) Laporan monitoring laman BPKP bulan Januari 2023.
- 6) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Februari 2023
- 7) Laporan monitoring laman BPKP bulan Februari 2023.
- 8) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Februari 2023.
- 9) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Maret 2023.
- 10) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Maret 2023.
- 11) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan Maret 2023.
- 12) Laporan Kinerja Biro Hukum dan Komunikasi Triwulan I Tahun 2023
- 13) Laporan pemantauan dan pengelolaan media sosial BPKP bulan April 2023.
- 14) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan April 2023.
- 15) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan April 2023.

- 16) Laporan pengelolaan berita harian BPKP bulan Mei 2023.
- 17) Laporan pemantauan isu dan analisis opini publik bulan Mei 2023.

E. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penggunaan dana untuk menjalankan kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 disajikan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5 – Realisasi Dana Biro Hukum dan Komunikasi s.d. Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator Ouput Kegiatan (IOK)	Anggaran dan Realisasi Dana		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	330.872.000	118.434.854	35,79
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	919.248.000	354.510.878	38,57
3	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	1.528.835.000	336.603.695	22,02
Jumlah		2.778.955.000	809.549.427	29.13

Dari total anggaran sebesar Rp2.778.955.000, realisasi belanja sebesar Rp809.549.427 atau sebesar 29,13%. Melihat data realisasi, hal yang menghambat penyerapan anggaran belum sesuai dengan *progress* triwulan yang di kisaran 50% karena sebagian kegiatan non rutin yang membutuhkan dana besar baru akan dieksekusi di triwulan III. Sebagai contoh, kegiatan pelatihan komunikasi bagi pimpinan dan pengelola reputasi unit kerja yang memiliki nilai anggaran cukup besar rencananya baru akan dilaksanakan di bulan Juli-Agustus. Penyebab lainnya adalah sebagian kegiatan yang dieksekusi s.d. triwulan II belum/hanya sedikit menggunakan dana.

Untuk memastikan penyerapan anggaran sesuai dengan *progress* triwulanan dan tidak menumpuk di akhir tahun, maka rencana tindaknya adalah pada periode triwulan III akan disusun target penyerapan anggaran sampai dengan akhir tahun sebagai bahan monitoring bulanan.

F. PENGGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Realisasi penggunaan sumber daya manusia (SDM) untuk menjalankan kegiatan Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan triwulan II 2023 disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6 – Realisasi Penggunaan SDM Biro Hukum dan Komunikasi s.d. Triwulan II Tahun 2023

No	Indikator Ouput Kegiatan (IOK)	Anggaran dan Realisasi Dana		
		Rencana (OH)	Realisasi (OH)	Capaian (%)
1	2	3	4	5
1	Jumlah Layanan Analisis Penyusunan, Pengelolaan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan	2.600	1.300	50
2	Jumlah Layanan Penelaahan dan Bantuan Hukum	3.400	1.711	50,32
3	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	5.857	3.023	51,61
Jumlah		11.857	6.034	50,89

Realisasi penggunaan SDM Biro Hukum dan Komunikasi sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 6.034 OH dari target 2023 sebesar 11.857 OH atau 50,89%. Hal ini menunjukkan bahwa target penggunaan OH pada triwulan II sebesar 50% sudah tercapai.

Faktor yang mendukung realisasi kinerja ini adalah kompetensi SDM yang menangani kegiatan yang telah ditargetkan serta ragam kegiatan yang turut berkontribusi terhadap kinerja. Secara umum tidak terdapat kendala yang berarti dalam mencapai target penggunaan SDM.

G. ANALISIS EFISIENSI

Untuk menganalisis efisiensi, indikator yang digunakan adalah dengan membandingkan sumber daya yang digunakan (*input*) dengan keluaran (*output*) yang dihasilkan. Dari perspektif penggunaan dana, terlihat terdapat *gap* yang cukup besar antara dana yang telah diserap (29,13% pada Tabel 5) dengan capaian Indikator Output Kegiatan sebesar 53,84% (pada Tabel 4). Walaupun demikian, hal ini bukan merupakan efisiensi yang sangat baik, akan tetapi merupakan kondisi di mana anggaran tidak sepenuhnya direpresentasikan dengan IOK. Selisih yang cukup besar ini salah satunya disebabkan adanya kegiatan non rutin di luar IOK yang memiliki anggaran besar namun baru akan dilaksanakan di triwulan III. Sebab lainnya adalah sebagian kegiatan yang dieksekusi s.d. triwulan II belum/hanya sedikit menggunakan dana.

Dari perspektif penggunaan sumber daya manusia, terlihat bahwa realisasi penggunaan SDM (Tabel 6) sebesar 50,89% lebih kecil dibandingkan dengan keluaran kegiatan (capaian IOK pada Tabel 4) yang mencapai 53,84%. Hal ini menunjukkan bahwa secara relatif penggunaan SDM telah efisien.

H. KINERJA LAINNYA

Selain kinerja yang telah diuraikan sebelumnya, sepanjang periode triwulan II tahun 2023 Biro Hukum dan Komunikasi juga memperoleh penghargaan-penghargaan dari pihak eksternal, yaitu:

1. *Bronzer Winner* kategori Laporan Tahunan Sub Kategori *Annual Report* dari PR Indonesia.
2. *Silver Winner* kategori Kanal Digital Sub Kategori Media Sosial Instagram.

Demikian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro,

Ditandatangani secara elektronik oleh

Azwad Zamroddin Hakim

Tembusan:

Yth. Sekretaris Utama BPKP (sebagai laporan)